

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Abdul, Latif. (2014). Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Achmad Badjuri. (2020). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." Universitas Stikubank.
- Ali, Mahrus. (2016). Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Zainudin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2014). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, Yesmil. (2008). Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Bambang Waluyo. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi Dan Optimalisasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Catatan ICW. (2020). Tren Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Selama 2019: Vonis Tanpa Efek Jera. Jakarta.
- Djaja, Ermansjah. (2010). Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (2006). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hartanti, Evi. (2006). Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heeks, Richard. (1999). Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Kartayasa, Mansur. (2017). Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif

- Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kencana.
- Klitgaard, Robert. (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan.
- Mardjono Reksodiputra. (1995). Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum. Jakarta: UI.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. (2009). Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (2003). Kumpulan Handout. Semarang.
- . (2010). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Fajar Intipratama.
- . (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenada Media.
- . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiyawati, Devy. (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Situmorang, Victor M. (1994). Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sofian Effendi. (2005). “Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance.” Makalah Seminar LokaKarya Nasional Reformasi Birokrasi, Kantor Menteri Negara PAN.
- Umarno, Yogi. (2021). Strategi Pemberantasan Korupsi. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Victorianus R. Puang. (2017). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Capiya Publishing.

## B. Jurnal

- Agus Riyanto, Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No 1, Oktober (2024).
- Arfandy Amran, Muhammad. "Analisis Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya XVIII*, No. 1 (2023).
- Dwi Aprillia Linda, Joyo Winoto, Suprehatin. Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurun Tingkat Korupsi Daerah. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10 No.1, Januari (2024).
- Fadli, M., & Sari, I. P. (2024). "Pendidikan Antikorupsi Berbasis Karakter di Sekolah Menengah: Studi Kasus di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Karakter*
- Hermawan, Dicky. "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* (2024).
- Kadek Sintia Dewi, Gusti. "Upaya Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Di Lapas Klas II A Banda Aceh Dan Rutan Klas II B Sigli." *Law Jurnal*.
- Kurniawan, A., & Hidayat, F. (2024). "Strategi Penguatan Kapasitas APIP dalam Pencegahan Korupsi di Era Digital." *Jurnal Administrasi Publik*
- Nugroho, H. (2022). "Integrasi Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3)
- Pratama, D. A., & Utami, R. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Sistem Pelaporan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*
- Do Parapat, Yonta. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid19." *Jurnal Esensi Hukum* 2 (2020).
- Richard Heeks. "Information Technology and Public Sector Corruption" 3, No. 4.
- Ridwan. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *Jurnal of law* 1 (2022).
- Subhan, Rizky. "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* (2025).
- Suharto, R. B., & Wicaksono, A. (2023). "Efektivitas E-Government dalam Mencegah Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2)

## C. Skripsi

Badjuri, Achmad. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia." Universitas Stikubank, 2020.

Effendi, Sofian. "Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governave." Makalah Seminar LokaKarya Nasional Reformasi Birokrasi diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN (2005).

Fata. "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)".

Parura Ronald Imanuel & Arie Purnomo. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Sorong Selatan. *Journal of Law Justice (JLJ)*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2023, Universitas Muhammadiyah Sorong.

Hartanto, Edy. "Evaluasi Kebijakan Kpk Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus: Program Monitoring Center for Prevention)".

M, Hidayatullah. "Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Illegal Logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur".

Pratama Putra, Wandu. "Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia." Universitas Islam Ahmad Dahlan, 2023.

#### **D. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Tanjungpinang dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tanjungpinang Tahun 2016.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah .

#### **E. Website**

Antara News. (2024, 15 Mei). Pemprov Kepri Komitmen Berantas Korupsi. Diakses pada 29 April 2025, pukul 21.45 WIB, dari <https://kepri.antarane.ws.com/berita/185466/pemprov-kepri-komitmen->

berantas-korupsi.

KBBI Lektor. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 29 April 2025, pukul 22.00 WIB, dari <https://kbbi.lektor.id/>.

Gramedia. (n.d.). Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya. Diakses pada 29 April 2025, pukul 21.30 WIB, dari <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/>.

Kumparan. (2022, 10 Desember). Proyek Penanganan Permukiman Kumuh di Tanjungpinang Dikorupsi, 4 Orang Tersangka. Diakses pada 29 April 2025, pukul 21.00 WIB, dari <https://kumparan.com/batamnews/proyek-penanganan-permukiman-kumuh-di-tanjungpinang-dikorupsi-4-orang-tersangka-1zPcgzhm6FU>.

Sijori Kepri. (2024, 3 Oktober). Kronologis Kejadian Kasus Korupsi Tablet BOS oleh ASN SMP Negeri 1 Tanjungpinang, 217 Unit Dijual Secara Ilegal. Diakses pada 29 April 2025, pukul 21.00 WIB, dari <https://sijorikepri.com/kronologis-kejadian-kasus-korupsi-tablet-bos-oleh-asn-smp-negeri-1-tanjung-pinang-217-unit-dijual-secara-ilegal/>.

